

DESENTRALISASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Nawatmi¹, Agung Nusantara², Ali Maskur³

Program Studi Keuangan dan Perbankan¹, Program Studi Pasca Sarjana², Program Studi Manajemen³, Fakultas
Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank

Email: nawatmi@edu.unisbank.ac.id¹, nusantara@edu.unisbank.ac.id², maskur@edu.unisbank.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi dengan berfokus pada variabel desentralisasi fiskal. Teknik analisis yang digunakan adalah pooling data. Data cross-section berasal dari 34 provinsi dan data time-series dari tahun 2015 – 2017. Hasil uji model dengan menggunakan Chow test dan Hausman test menunjukkan bahwa model terbaik adalah fixed effect model. Hasil regresi model tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata kunci: *Pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pooling data, dan fixed effect model*

Abstract

This is research on economic growth, which is associated with a variable of fiscal decentralization. The analysis technique used is pooling data. The cross-section data consists of 34 provinces and time-series data starting from 2015 - 2017. To test the best model of the three models used the Chow and Hausman test. The model test results show that the best model is the fixed effect model. The regression results with the model show that fiscal decentralization has a positive impact on regional economic growth.

Key words: *economic growth, fiscal decentralization, pooling data and fixed effect model*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhannya. Menurut Todaro dan Smith (2006), tujuan dari pembangunan ekonomi selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan dan penyediaan lapangan pekerjaan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Berbagai kebijakan dirumuskan pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk mengubah sistem ekonomi dari pemerintahan yang tersentralisasi menjadi sistem yang terdesentralisasi sejak tahun 2001. Pada sistem sentralisasi, program-program dan kebijakan-kebijakan dibuat di tingkat pusat dan dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia secara seragam. Hal tersebut menyebabkan permasalahan yang sulit untuk dipecahkan karena antar wilayah kondisinya berbeda-beda.

Perekonomian Indonesia pada periode 1990-1996 dengan sistem sentralisasi memang mengalami pertumbuhan yang bagus. Akan tetapi kondisi ekonomi Indonesia memburuk setelah mengalami krisis ekonomi tahun 1997 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terpuruk hingga mencapai minus 13.13% pada tahun 1998. Terpuruknya ekonomi Indonesia disinyalir bukan hanya karena faktor krisis Thailand tetapi juga karena fundamental ekonomi Indonesia yang lemah dengan sistem sentralistiknya. Oleh karena itulah, pada tahun 2001 sistem ekonomi dan pemerintahan diubah menjadi bersifat desentralisasi.

Pada aspek fiskal, desentralisasi mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal penerimaan/pendanaan. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada, baik dari sumber penerimaan pusat maupun daerah (Bahl, 1998).

Desentralisasi fiskal dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik karena pemerintah daerah adalah institusi yang dekat dan langsung berhadapan dengan rakyat akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan rakyatnya (Oates, 1972). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi pada sektor publik dan memotong defisit anggaran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bird, 2000; Bahl, 1998; dan Oates, 1993). Hasil tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Akai dan Sakata (2002) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut bisa terjadi karena desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah akan memberikan jasa publik sesuai kebutuhan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, efisiensi tersebut akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah bertambah cepat.

Hasil tersebut di atas ternyata bertentangan dengan hasil penelitian dari Zhang dan Zou (1998) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun penelitian dari

Nelson (1986) menunjukkan bahwa desentralisasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat.

Di masa desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola keuangan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan khususnya pada sektor publik. Desentralisasi di satu sisi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan di sisi lainnya bisa jadi justru berdampak negatif atau malah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Desentralisasi

Desentralisasi adalah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Salah satu wujud desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan ke tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, terbentuknya dewan maupun kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan adanya bantuan berupa transfer dari pusat.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi, jika pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan di sektor publik, maka harus didukung oleh pusat berupa subsidi atau bantuan ataupun pinjaman dari pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai baik dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pada hakekatnya, pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Stiglitz, 2000).

Dalam *The General Theory*, Keynes menyatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan kekuatan perpajakan dan pengeluaran untuk meningkatkan pengeluaran agregat dalam masa resesi ataupun depresi ekonomi. Pemerintah bisa mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal dapat dilakukan secara langsung ataupun dengan melakukan investasi pada fasilitas-fasilitas penunjang seperti misalnya investasi infrastruktur, ekonomi dan sosial. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja secara tradisional menjadi faktor positif yang memicu pertumbuhan ekonomi.

Teori klasik akhirnya berkembang menjadi teori Neoklasik yang dimotori Harrod Domar dan Robert Solow. Harrod Domar menganggap bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi pembentukan modal tersebut, sedangkan Solow menjelaskan tentang pertumbuhan stok kapital, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian. Ketiga variabel tersebut mempengaruhi pendapatan baik nasional maupun regional.

Model pertumbuhan Neoklasik mengasumsikan mobilitas faktor produksi baik modal maupun tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan kurang lancar. Pada saat itu, modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan cenderung melebar. Pada proses pembangunan selanjutnya, semakin baiknya prasarana dan komunikasi, mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar. Setelah negara menjadi maju, ketimpangan pembangunan akan berkurang.

2.3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Hal itu terjadi karena desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.

Esensi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal setidaknya mempunyai tiga pertimbangan, yaitu: (1) pertumbuhan dilihat sebagai sesuatu yang objektif dari desentralisasi fiskal dan efisiensi dalam alokasi sumber daya dalam sektor publik (2) secara eksplisit pemerintah berusaha untuk mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendorong ke arah peningkatan pendapatan perkapita (3) pertumbuhan per kapita relatif lebih mudah untuk diukur dan diinterpretasikan dibanding indikator ekonomi lainnya.

2.4. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian Akai dan Sakata (2002), maupun Bahl (2006) menunjukkan bahwa adanya desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi hasil tersebut berlawanan dengan temuan Zhang and Zou (1998), dimana obyek penelitian di India dan hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi menghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil berbeda ditunjukkan Oates (1993) dan Nelson (1986). Kedua peneliti menunjukkan tidak adanya hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi

3. METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode waktu 2015-2017 untuk 34 provinsi di Indonesia. Sumber data berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Keuangan. Data

yang digunakan adalah derajat desentralisasi fiskal, modal daerah, jumlah tenaga kerja (*labor*), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB provinsi.

3.2. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$G = \beta_0 + \beta_1 \text{DDF} + \beta_2 \text{Modal} + \beta_3 \text{Labor} + \beta_4 \text{IPM} + \varepsilon$$

Dimana:

G : Growth (Pertumbuhan ekonomi daerah)

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

β_0 : Konstanta

β_{1-4} : Koefisien

ε : *Disturbance error*

DDF yang digunakan dalam model mengadopsi dari IMF (*International Monetary of Fund*) yaitu *fiscal decentralization Indicators* yang mengukur dari sisi pengeluaran.

$$\text{DDFit} = \frac{\text{TB Prov it}}{\text{TB Pusat t} - \text{Trf Pusat ke Prov it} + \text{TB Prov it}}$$

DDF it adalah derajat desentralisasi fiskal provinsi i pada tahun t; TB Prov it adalah total belanja provinsi i pada tahun t; TB Pusat adalah total belanja pusat pada tahun t; Trf Pusat Ke Provinsi it adalah transfer Pusat atau dana perimbangan ke provinsi i pada tahun t;

3.3. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi: jumlah output yang dihasilkan suatu perekonomian (PDRB dalam milyar rupiah)
2. Modal : seluruh penambahan modal yang dilakukan oleh sektor pemerintah dan non pemerintah (pembentukan modal tetap bruto dalam milyar rupiah)
3. *Labor* adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja (orang)
4. DDF adalah derajat desentralisasi fiskal
5. IPM adalah indeks pembangunan manusia yang pengukurannya meliputi umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

3.4. Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan data panel. Data panel (*pooled data*) adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu yang menggabungkan antara data *cross section* dan *time series*. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel *cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted-variables*; model yang mengabaikan variabel yang relevan.

Data panel berguna juga untuk alasan teknis-pragmatis, yaitu terkait dengan ketersediaan data. Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*, maka akan mampu menambah jumlah observasi secara signifikan tanpa melakukan *treatment* apapun terhadap data. Oleh karenanya, data panel mungkin memberikan penyelesaian yang memuaskan.

Dalam analisis model data panel dikenal tiga macam pendekatan estimasi yaitu:

a. Pendekatan *common effect*

Pada pendekatan ini, estimasi model persamaan yang paling sederhana adalah mengabaikan dimensi *cross-section* dan *time series* dari data panel dan mengestimasi data dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) yang diterapkan dalam data yang berbentuk *pool*. Model *common effect* mengasumsikan bahwa nilai *intercept* dan *slope parameter* adalah sama untuk setiap subyek.

b. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model/FEM*)

Istilah *fixed effect* datang dari kenyataan bahwa meskipun *intercept* mungkin berbeda antar individu, namun *intercept* setiap individu tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu (*time invariant*). Jika *intercept* ditulis sebagai α_{it} , berarti *intercept* setiap perusahaan adalah *time variant*. Selain itu FEM juga mengasumsikan bahwa koefisien dari regresor tidak bervariasi baik antar waktu maupun antar individu.

c. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model/REM*)

Perbedaan mendasar FEM dan REM adalah mengenai asumsi *unobservable individual effect* (μ_i). Jika di dalam FEM, μ_i diasumsikan berkorelasi dengan regresor (X), maka dalam REM, μ_i diasumsikan tidak berkorelasi dengan regresor X atau dengan kata lain μ_i diasumsikan bersifat random. REM menghasilkan estimator-estimator hasil estimasi yang lebih efisien (standar error yang lebih kecil atau t-stat yang lebih besar) dari pada FEM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menentukan model terbaik maka, ada dua langkah yang harus dilakukan. Pertama, menentukan model yang terbaik dari dua model yaitu model *common effect* dan model *fixed effect* dengan Chow Test (tabel 4.1).

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	145.314631	(33,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	441.637931	33	0.0000

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari *cross-section Chi-square* lebih kecil dari 5 persen. Artinya, model terbaik di antara dua model tersebut adalah model *fixed effect*. Langkah selanjutnya menentukan model mana yang terbaik di antara model *fixed effect* dan *random effect* dengan menggunakan *Correlated random effect - Hausman Test* (tabel 4.2).

Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	107.329625	4	0.0000

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section random* dibawah 5 persen. Hal itu berarti bahwa model terbaik yang akan digunakan untuk dianalisis lebih lanjut antara *fixed effect* dengan *random effect* adalah model *fixed effect*. Model *fixed effect* pada dasarnya tetap berprinsip OLS (*Ordinary Least Square*). Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu (*cross-section*) dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnnya.

Berdasar penjelasan di atas, nampak bahwa model terbaik dari tiga alternatif model dalam pooling data adalah model *fixed effect*. Oleh karena itu untuk pengujian hipotesis maupun analisis lebih lanjut digunakan model *fixed effect*.

Berdasar tabel 4.3 menunjukkan bahwa secara umum derajat desentralisasi fiskal 34 provinsi di Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (provinsi). Hal ini berarti bahwa jika derajat desentralisasi fiskal suatu provinsi di Indonesia meningkat sebesar satu point maka PDRB provinsi tersebut akan meningkat sebesar Rp 158.164,2 milyar dan sebaliknya jika derajat desentralisasi fikal menurun sebesar satu point maka akan menurunkan PDRB provinsi tersebut sebesar Rp 158.164,2 milyar.

Untuk variabel modal juga menunjukkan hal yang sama yaitu modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (provinsi) dengan nilai koefisiennya sebesar 0,090563. Artinya, jika modal provinsi meningkat sebesar Rp 10 milyar maka, maka PDRB provinsi tersebut akan meningkat pula sebesar Rp 0,90563 milyar.

Tabel 4.3
Hasil Regresi Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7317.016	126795.9	0.057707	0.9542
DDF	158164.2	10354.06	15.27558	0.0000
MODAL	0.090563	0.042575	2.127123	0.0373
LABOR	0.015114	0.004500	3.358266	0.0013
IPM	1514.728	1913.587	0.791565	0.4315

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.999597	Mean dependent var	279697.1
Adjusted R-squared	0.999364	S.D. dependent var	394203.4
S.E. of regression	9943.247	Akaike info criterion	21.52618
Sum squared resid	6.33E+09	Schwarz criterion	22.50411
Log likelihood	-1059.835	Hannan-Quinn criter.	21.92218
F-statistic	4288.731	Durbin-Watson stat	2.035710
Prob(F-statistic)	0.000000		

Variabel bebas lainnya adalah *labor*. Berdasar hasil olah data menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan koefisiennya sebesar 0,015114. Hal itu berarti bahwa jika jumlah tenaga kerja yang bekerja meningkat sebesar 10 tenaga kerja maka akan meningkatkan PDRB provinsi tersebut sebesar Rp 0,15114 milyar.

Variabel keempat atau terakhir adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang mengukur umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Hasil regresi menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk uji F statistik menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel derajat desentralisasi fiskal, modal, jumlah tenaga kerja yang bekerja dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai *the goodness of fit* atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,999597 atau 99,9597 persen. Hal ini berarti bahwa total variasi dari pertumbuhan ekonomi provinsi mampu dijelaskan oleh model sebesar 99,9597. Kemampuan model yang digunakan pada penelitian ini dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara derajat desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan adalah positif signifikan. Hal itu berarti bahwa meningkatnya derajat desentralisasi fiskal, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah akan memberikan jasa publik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Efisiensi tersebut akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah bertambah cepat.

Implikasi dari temuan tersebut adalah, jika pemerintah daerah menginginkan pertumbuhan ekonomi daerah tinggi maka, kebijakan desentralisasi harus betul-betul ditegakkan sehingga kesejahteraan masyarakat akan mudah tercapai, karena tujuan dari kebijakan desentralisasi adalah memenuhi aspirasi daerah terkait penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik disetiap daerah.

Jika pemerintah daerah menginginkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka, pembentukan modal bruto daerah juga harus ditingkatkan baik itu modal yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh non pemerintah. Di samping itu, berbagai kemudahan dalam melakukan investasi harus diberikan oleh pemerintah daerah. Di samping itu, jumlah tenaga kerja yang bekerja harus ditingkatkan juga. Peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Apalagi jika tenaga kerja tersebut betul-betul berkualitas maka, akan semakin mempercepat peningkatan output yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika pemerintah daerah menginginkan IPM signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan maka, pemerintah daerah harus mendorong kesadaran masyarakat untuk meraih pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, salah satunya dengan membuat peraturan wajib belajar 12 tahun misalnya. Tetapi konsekuensinya, pemerintah harus menyediakan sekolah gratis atau memberi beasiswa pada masyarakat yang tidak mampu.

5. KESIMPULAN

Desentralisasi yang ditunjukkan dalam bentuk DDF (derajat desentralisasi fiskal) menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa kemandirian dalam pengeluaran fiskal akan mendorong pertumbuhan provinsi yang bersangkutan. Di samping itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maka, jumlah modal yang diinvestasikan dan jumlah tenaga kerja yang bekerja harus terus ditingkatkan.

Perlunya pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan agar IPM menjadi signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Todaro, MP dan S.C. Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi*, Jilid 1, Edisi 9, Alih Bahasa, Erlangga, Jakarta.
- [2] Bahl, R., 1998, *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*, The World Bank Institute, Washington, DC.
- [3] Oates W. E., 1972, *Fiscal Federalism*, Harcourt Brace Jraovich, New York.
- [4] Bird, R. Dan Francois V., 2000, *Desentralisasi Fiskal Di Negara-negara Sedang Berkembang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [5] Bahl, R., 1998, *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*, The World Bank Institute, Washington DC.
- [6] Oates W. E., 1993, Fiscal Decentralization And Economic Development. *National Tax Journal*, 2 (46).
- [7] Akai, Nabuo dan Masayo Sakata, 2002, Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State – Level Cross Section Data for The United State, *Journal of Urban Economics* 52, pp. 93-108.
- [8] Zhang T. dan Zhou, HF., 1998, Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China, *Journal of Public Economics*, 69: 221-240.
- [9] Nelson, M. A, 1986, *An empirical Analysis of State and Local Tax Structure in The Contex of The Leviathan Model of Government Public Choice* 49: 283-294.
- [10] Stiglitz, Je., 2000, *Economics of The Public Secto.*, Third Edition, Norton & Company, New York.
- [11] Solow, Robert M., 1996, A Contribution to The Theory Of Economic Growth, *Quarterly Journal of economic.s*